

**PERAN POLRESTA BARELANG DALAM
MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Hildayani Simanjuntak

141010011

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PERAN POLRESTA BARELANG DALAM
MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



Oleh:

Hildayani Simanjuntak

141010011

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

2018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain. Dan skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 03 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,


Hildayani Simanjuntak

141010011

**PERAN POLRESTA BARELANG DALAM
MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:
Hildayani Simanjuntak
141010011**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 03 Agustus 2018



Timbul Dompok, S.E., M.Si

Pembimbing

ABSTRAK

Batam merupakan salah satu kota dari Provinsi Kepri di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan atau yang disebut juga heterogenitas cukup tinggi, baik di lihat dari segi etnisitas, agama, kebudayaan maupun status sosial. Keberadaan kota batam sebagai daerah pariwisata mengakibatkan menjadi daerah yang begitu terbuka dalam menerima pengaruh, baik yang bersifat positif, maupun negatif. Ditambah lagi dengan jumlah penduduk yang mayoritas atau setengahnya anak yang memiliki masalah yang beragam mengakibatkan batam menjadi penyangga persoalan sosial yang tidak sederhana. Begitu kompleksnya permasalahan yang terjadi di daerah batam, diantaranya adalah masalah kekerasan seksual terhadap anak yang cukup menonjol. Beberapa kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan perlu adanya peran sektor lain untuk mendukung terpenuhinya hak-hak anak. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran Polresta Bareleng Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Batam. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek dari penelitian ini adalah pegawai Unit PPA Polresta Bareleng, pengurus LSM Yayasan Embun Pelangi, orang tua Korban, masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polresta Bareleng Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Batam bisa dikatakan sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Namun belum membuat para pelaku kekerasan seksual terhadap anak mendapatkan efek jera, sehingga masih bisa dikatakan tingkat kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun meningkat. serta untuk sosialisasi yang dilakukan masih belum meluas dikalangan masyarakat, sehingga masyarakat di kota Batam masih belum paham akan rawannya tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu Unit PPA memiliki hambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual seperti saksi, keterangan korban, dan visum menjadi faktor penghambat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batam.

Kata Kunci : Peran Polresta Bareleng, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

Batam is one of the cities of the Riau Islands Province in Indonesia which has a pluralistic level or so-called heterogeneity is quite high, both in view in terms of ethnicity, religion, culture and social status. The existence of the city of Batam as a tourist area resulted in a region that is so open in receiving influence, both positive and negative. Once complex problems that occur in Batam areas, among them is the problem of sexual violence against children is quite prominent. Some cases of violence against children indicate the need for other sectors to support the fulfillment of children's rights. This study was conducted to describe the role of Barelang Police in Handling Sexual Violence Case Against Children In Batam City. Methods of data collection by way of observation, interviews, and documentation. The object of this research is employee of Unit PPA Polresta Barelang, board of NGO Yayasan Embun Pelangi, Victim's parents, society. The results showed that the role of Barelang Police in Handling Sexual Violence Cases on Children In Batam City can be said to have been running in accordance with the Act but has not made the perpetrators of sexual violence against children to get a deterrent effect, so it can be said the level of sexual violence against children every year increased. as well as for socialization that is done has not been widespread among the community, so people in the city of Batam still do not understand the vulnerability of acts of sexual violence against children. In addition, the PPA Unit has obstacles in handling cases of sexual violence such as witnesses, victim's information, and visa as an inhibiting factor in handling cases of child sexual abuse in Batam City.

Keywords: *The Role of Barelang Police, Sexual Violence, Child*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kelimpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul “Peran Polresta Bareleng Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Batam” ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun penyusunan skripsi ini diajukan sebagai syarat memperoleh gelar S1 Universitas Putera Batam. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak,

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.S.I. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara
3. Bapak Timbul Dompok, S.E., M.Si. selaku Pembimbing skripsi dan pembimbing akademik yang selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, motivasi serta dukungan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak/Ibu Penguji yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Universitas Putera Batam, yang telah memberi wawasan kepada penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman, serta motivasinya.

6. Ibu Iptu Drefani Diah Yunita selaku Kepala Unit yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Unit PPA Polresta Barelang, Ibu Bripda Chintya Meliana selaku penyidik PPA Polresta Barelang yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal didalam melakukan penelitian di Sat Reskrim Unit PPA Polresta Barelang .
7. Bapak Irwan Setiawan selaku Pengurus LSM Yayasan Embun Pelangi yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam segala hal didalam melakukan penelitian di LSM Yayasan Embun Pelangi.
8. Kedua orang tua penulis ayahanda Alm. Monang Simanjuntak yang baru meninggalkan penulis pada bulan November 2017 dengan pesan harus tetap semangat dan pantang menyerah serta ibunda Rukia Siahaan yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan agar tidak mudah putus asa dan terus bekerja keras dalam menyelesaikan studi.
9. Untuk seluruh keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi, serta yang selalu memberikan dukungan dan selalu merangkul agar tetap semangat sampai penelitian ini selesai.
10. Teman-teman di Universitas Putera Batam program studi Administrasi Negara angkatan 2014 khususnya Permata Sari Murni dan Ester Rusadi Nababan yang selalu menghibur, memberikan semangat yang

luar biasa dan membantu ketika penulis mengalami kesulitan selama penyusunan skripsi.

11. Serta seluruh pihak yang telah memberikan masukan, kritikan serta bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdoa, semoga Tuhan membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan setimpal. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kelancaran penyusunan skripsi. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Batam, 03 Agustus 2018



Hildayani Simanjuntak

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAKi

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR GAMBAR.....ixx

DAFTAR TABEL x

DAFTAR SINGKATANxi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang1

1.2. Rumusan Masalah7

1.3. Tujuan Penelitian7

1.4. Manfaat Penelitian8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar.....10

2.1.1. Teori Administrasi Publik10

2.1.2. Peran12

2.1.2.1. Peran Polisi15

2.1.2.1.1. Tugas dan Wewenang Polisi.....17

2.1.2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum18

2.1.2.1.3. Asas-Asas Hukum20

2.1.2.2. Peran Pemerintah.....21

2.1.2.3. Peran LSM.....	23
2.1.3. Kekerasan	23
2.1.3.1. Bentuk-Bentuk Kekerasan.....	24
2.1.3.2. Faktor Pendorong Seseorang Melakukan Kekerasan Seksual.....	26
2.1.3.3. Dampak Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	27
2.1.4. Anak	28
2.1.4.1. Konvensi Hak Anak.....	29
2.2. Penelitian Terdahulu	30
2.3. Kerangka Pemikiran.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Fokus Penelitian.....	39
3.3. Sumber Data.....	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5. Metode Analisis Data.....	41
3.6. Keabsahan Data.....	42
3.7. Lokasi Dan Jadwal Penelitian	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	45
4.1.1. Gambaran Umum Sat Reskrim Unit Ppa Polresta Barelang	45
4.1.2. Struktur Organisasi	47
4.1.3. Tugas dan Fungsi.....	48
4.1.4. Sumber Daya Manusia	53
4.1.5. Peran Polresta Barelang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Batam	54
4.1.6. Hambatan Polresta Barelang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak	64
4.1.7. Upaya yang Dilakukan Polresta Barelang untuk Mengatasi Hambatan dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Batam.....	68
4.2. Pembahasan.....	72
4.2.1. Peran Polresta Barelang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Batam	72
4.2.2. Hambatan Polresta Barelang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak	75

4.2.3. Upaya yang Dilakukan Polresta Barelang untuk Mengatasi Hambatan dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Batam.....	76
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	78
5.2. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA.....	81
----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 3.1 Jadwal Penelitian	
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	47
Gambar 4.2 SDM Sat Reskrim Polresta Bareleng Kota Batam	53
Gambar 4.3 Sosialisasi Polresta Bareleng Dalam Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat.....	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Laporan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Batam.....	5
Tabel 3.2 Informan Penelitian Pada Sat Reskrim Unit PPA Polresta Barelang Kota Batam	41
Tabel 4.1 Program Pendampingan Korban Kekerasan Seksual.....	63

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
CSO	: <i>Civil Society Organizations</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
SDM	: Sumber Daya Manusia
PPA	: Pelayanan Perempuan dan Anak
Sat Reskrim	: Satuan Reserse Kriminal
Kasat	: Kepala Satuan
Wakasat	: Wakil Kepala Satuan
SP2HP	: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Mindik	: Memberikan Input Data Penyidikan
Kaur Mintu	: Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan
Kaur Bin Ops	: Kepala Urusan Pembina dan Operasional
Pidum	: Pidana Umum
Pidkor	: Pidana Korupsi
Harda	: Harta Benda
Pidsus	: Pidana Khusus
Ranmor	: Kendaraan Bermotor
Kasubnit	: Kepala Subdirektorat
Iptu	: Inspektur Polisi Satu
Bripda	: Brigadir dua
TKP	: Tempat Kejadian Perkara

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN
LAMPIRAN II DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN IV DOKUMENTASI